

EFEKTIVITAS PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PELATIHAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Antimus Xaverius Ansfridho, Dody Setyawan

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

Email: ansfrido04@gmail.com

Abstract: *There still are discriminations against groups of people with special needs or better known as people with disabilities, as an example these groups of people had a difficulties to access public services, education, transportation and decent work. Fulfillment of the rights of persons with disabilities is a problem, which is why many people with disabilities live with limitations not only in economic, but also in social aspects. This study used a qualitative method, the determination of informants using snowball sampling and the head of staff in the disability field in Batu City Social Service became a key informant in this study. The aim of this study is to see the effectiveness of performance achievements in training programs for disabilities in the Social Service Office of Batu City. The results of this study at Batu City Social Service can be said effective if measured based on the effectiveness indicator size, that are indicators of achieving goals and real changes. Furthermore, the level of effectiveness was shown by the results of the maximum screen printing training from the participants, the adequate tools and facilities, then experts and social approach methods that implemented Batu City Social Service for participants (persons with disabilities) were able to make them more confident to join the screen printing training program well and maximally.*

Keywords: *Effectiveness, Training Programs, Persons with Disabilities.*

Abstrak: Masih terdapat diskriminasi terhadap kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus atau yang lebih dikenal dengan istilah penyandang disabilitas, akibatnya kelompok masyarakat tersebut sangat kesulitan untuk mengakses pelayanan publik, pendidikan, transportasi dan pekerjaan yang layak. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih menjadi masalah, sehingga tidak dipungkiri bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang hidup dengan keterbatasan dalam aspek ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penentuan informan menggunakan *snowball sampling* dan kepala staff bidang penyandang disabilitas Dinas Sosial Kota Batu menjadi *key informan* pada penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pencapaian kinerja proram pelatihan bagi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kota Batu. Hasil analisis pencapaian kinerja program pelatihan pada Dinas Sosial Kota Batu dapat dikatakan efektif jika diukur berdasarkan ukuran indikator efektivitas yaitu indikator tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Selanjutnya, tingkat efektivitas nya di tunjukan dengan hasil pelatihan sablon yang maksimal dari peserta, alat-alat dan fasilitas yang digunakan memadai, tenaga ahli dan metode pendekatan sosial yang terapkan Dinas Sosial Kota Batu bagi peserta (penyandang disabilitas) mampu membuat mereka lebih percaya diri untuk mengikuti program pelatihan sablon dengan baik dan maksimal.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Pelatihan, Penyandang Disabilitas.

PENDAHULUAN

Manusia secara kodrati terlahir sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia sebagai makhluk individu memiliki kekhususan, ciri khas, kepribadian, karakter, yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, dimana manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam proses kehidupan bermasyarakat (Suarmini dkk, 2016 :78). Setiap manusia juga terlahir dengan hak dan kewajiban yang sama, hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh terabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa selain hak asasi manusia, sebagai manusia kita juga mempunyai kewajiban yang

mendasar yaitu antara manusia yang satu terhadap yang lainnya dan juga terhadap masyarakat luas secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, hal ini berlaku pula bagi kelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan fisik dan kelainan intelektual, yang tidak bisa berfungsi secara normal atau yang lebih dikenal dengan istilah penyandang disabilitas (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016). Berdasarkan data, lebih dari satu miliar orang atau 15% penduduk dunia adalah penyandang disabilitas, dan lebih dari 70% merupakan penduduk dalam usia kerja dan anak dalam ruang lingkup pendidikan (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, 2017). Pada tahun 2013 data dari ILO menunjukkan bahwa sekitar 82% penyandang disabilitas berada pada negara-negara berkembang dan kehidupan mereka berada di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak (*International Labour Organization*, 2013). Konvensi tentang hak penyandang disabilitas telah mengajak semua negara agar memberikan perhatian kepada masalah penyandang disabilitas, agar penyandang disabilitas mendapatkan akses kepada pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sosial politik (Konvensi Hak Asasi Difabel PBB, 2011).

Pemerintah Indonesia sendiri telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menunjukkan tekad Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 Ayat 2, yang mengatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berkaitan dengan ini, berarti penyandang disabilitas berhak memperoleh kedudukan, hak dan kewajiban serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya disegala aspek kehidupan dan penghidupan (Simanjorang, 2013:3). Pemerintah Indonesia kemudian memulai langkah nyata terkait keseriusan negara memperhatikan serta menjamin hak-hak penyandang disabilitas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Dimata hukum, penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dimana penyandang disabilitas memiliki hak dan akses yang sama dalam kehidupan sosial dan politik, pendidikan, kesejahteraan sosial, perawatan medis, pekerjaan, serta akses kepada fasilitas publik dan pelayanan umum (Setyaningsih dan Gutama, 2016:44). Menurut Iffatus (2017 :185), masalah Utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, dan partisipasi politik atau keadilan. Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, hambatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam kaitan dengan lingkungan fisik, teknologi informasi dan komunikasi, legislasi dan pelaksanaan program yang belum efektif, serta sikap masyarakat yang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Menindaklanjuti masalah tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur No 125 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, secara langsung hadir sebagai landasan tentang pemberdayaan bagi penyandang disabilitas melalui program pelatihan keterampilan. Kebijakan ini secara spontan membuka ruang dan akses bagi para penyandang disabilitas untuk berkarya melalui pelatihan-pelatihan yang di selenggarakan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial, khususnya bagi mereka yang berada di ruang lingkup Provinsi Jawa Timur.

Kota Batu sendiri jumlah penyandang disabilitas sebanyak 398 jiwa, angka ini diperoleh dari data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2018 milik Dinas Sosial Kota Batu. Kota Batu memiliki beberapa masalah terkait penanganan maupun pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, seperti yang dikutip dari pernyataan salah satu staff di Dinas Sosial Kota Batu, yang menyatakan bahwa masih ada masyarakat yang melihat penyandang disabilitas dengan stigma negatif (masalah sosial), seperti menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak produktif, tidak bisa bekerja dan tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah lain yang dialami penyandang disabilitas yaitu, masih ada anggota keluarga yang menyembunyikan keberadaan penyandang disabilitas atau dengan kata lain, anggota keluarga tidak ingin masyarakat luas tahu bahwa anggota keluarganya adalah penyandang disabilitas. Sehingga, hal ini lah yang menghambat kinerja program dari Dinas Sosial dalam mendata penyandang disabilitas untuk diberikan bantuan sosial atau diberdayakan. Selanjutnya, penyandang disabilitas mengalami keterbatasan untuk mengakses pekerjaan, hal ini dikarenakan stigma negatif masyarakat terhadap kaum difabel dan kurangnya eksistensi nya penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat. Salah satu staff yang menangani masalah penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Batu mengatakan bahwa penyandang disabilitas akan lebih dihargai lewat karya yang mereka hasilkan, dan mereka juga akan bisa diterima di tengah masyarakat melalui karya. Namun sebelum itu tentu harus ada pelatihan yang akan di lakukan, agar kemampuan dan kreativitas mereka meningkat dan menjadi lebih baik (Dinas Sosial Kota Batu). Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif pencapaian kinerja program pelatihan bagi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kota Batu.

Program pelatihan yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu bagi penyandang disabilitas tentu memiliki tujuan, salah satu tujuan tersebut adalah untuk menumbuhkan motivasi dan inovasi penyandang disabilitas untuk terus berkarya, karena hal ini akan menjadi modal untuk mereka siap memasuki dunia kerja. Tujuan lain dari program pelatihan ini adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka dan mengubah stigma masyarakat yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak bisa berkarya. Manfaat pelatihan yang diharapkan dari program pelatihan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu perilaku (*attitude*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) (Widodo, 2018: 13).

Program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu akan dilihat berdasarkan teori efektivitas, dalam Indrawijaya, (2010 :176), menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target dan kualitas, kuantitas dan waktu telah dicapai. Makin besar terget yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Efektivitas menjadi suatu target akhir yang harus dan wajib dicapai oleh organisasi atas program yang telah direncanakan sebelumnya, secara sederhana efektivitas selalu berbicara kesesuaian antara program yang disusun diawal dengan hasil akhir yang dicapai. Program pelatihan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Batu yaitu program pelatihan sablon bagi penyandang disabilitas di Kota Batu, kemudian untuk menilai apakah program yang telah disusun diawal telah sesuai atau tidak dengan hasil akhir yang dicapai maka dari itu teori ukuran efektivitas menurut Sutrisno, (2010 :148), dapat menjelaskan bahwa cara menentukan efektivitas suatu program dapat diukur melalui enam indikator, pertama indikator ketetapan sasaran, pemahaman program, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan dan indikator perubahan nyata. Namun pada penelitian ini, hanya menggunakan dua indikator untuk mengukur tingkat efektivitas program pelatihan sablon yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu, indikator yang digunakan adalah indikator tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Selanjutnya, pada penelitian ini kebijakan publik berbicara tentang dasar regulasi yang dipakai untuk melihat program pelatihan ini, kebijakan publik secara sederhana diartikan sebagai suatu aturan yang di buat untuk mengatasi masalah-masalah publik. Kebijakan publik juga merupakan

produk hukum yang berupa aturan-aturan, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk ucapan lisan mengenai pernyataan, himbauan, inovasi, serta ajakan yang dilakukan pemerintah sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang perlu dipecahkan, dikurangi, dan dicegah agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat (Setyawan, 2017 :20).

Kebijakan yang dipakai untuk melihat program pelatihan ini adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. Kebijakan tentang program pelatihan bagi penyandang disabilitas terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tentang Pelatihan Kerja Calon Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, dimana dalam pasal 7 ini menjelaskan bahwa “Setiap calon tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu. Selain itu kebijakan sosial mempunyai peran penting dalam proses berjalannya kebijakan publik di atasnya, kebijakan sosial dalam konteks ini adalah suatu aturan yang dibuat untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan melakukan proses pendekatan sosial agar program yang dijalankan benar-benar sampai kepada masyarakat.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik (bagian dari bentuk kebijakan publik yang dibuat), kebijakan sosial juga diartikan sebagai ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (Suharto,2013 :10). Teori kebijakan publik dan kebijakan sosial telah difungsikan dalam penelitian ini, selanjutnya teori implementasi kelompok sasaran kebijakan juga memberikan pandangan bahwa dalam penelitian ini kelompok masyarakat yang menjadi sasaran implementasi kebijakan berupa program pelatihan dari Dinas Sosial Kota Batu adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus atau yang mereka memiliki keterbatasan fisik, mental maupun fisik dan mental, kelompok masyarakat ini lebih dikenal dengan istilah penyandang disabilitas. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, yang menjadi sasaran adalah masyarakat tersebut (Setyawan, 2017 :108).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Menurut Creswell dalam Sugiyono (2017 :3-4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Teknik dalam pengambilan informan menggunakan cara menurut Sugiyono (2017 :96), yaitu teknik penentuan informasi ini menggunakan *snowball sampling* yang mulanya jumlahnya kecil, kemudian membesar.

Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah kepala staff khusus menangani bidang penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Batu. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan informan, studi dokumen, dan pengamatan dilapangan. Informan terdiri dari Kepala Staff yang khusus menangani penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Batu, guru pembina pelatihan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Eka Mandiri Kota Batu dan Peserta program pelatihan yakni siswa SD,SMP dan SMA Sekolah Luar Biasa Eka Mandiri Kota Batu.

Wawancara mendalam dilakukan peneliti kepada informan yang benar-benar mengerti dan memahami serta terlibat langsung dalam program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu di Sekolah Luar Biasa Eka Mandiri Kota Batu. Observasi dilakukan secara komprehensif, selanjutnya ditunjang dengan analisis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak-hak penyandang disabilitas, Peraturan Gubernur No 125 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dan dokumen laporan hasil program pelatihan di Dinas Sosial Kota Batu serta beberapa dokumentasi penunjang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara sederhana definisi efektivitas adalah kesesuaian antara program yang disusun dengan hasil yang dicapai (tercapainya tujuan). Menurut Indrawijaya, (2010 :176), efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target dan kualitas, kuantitas dan waktu telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Pengertian ini sangat jelas mengatakan, bahwa suatu program dapat dikatakan efektif jika telah mencapai tujuan dari program yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya, karena jika hasilnya tidak memenuhi standar rancangan program maka bisa dikatakan kurang efektif bahkan dapat dikatakan tidak efektif. Suatu program dapat dikatakan tidak efektif jika hasil akhir tidak memenuhi bahkan jauh dari standar keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi jika hasil capaian program sesuai dengan rancangan program maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Sutrisno (2010 :148), suatu program dapat diukur tingkat efektivitasnya melalui dua indikator yaitu indikator tercapainya tujuan dan indikator perubahan nyata. Indikator tercapainya tujuan sendiri memiliki makna bahwa suatu program tentu memiliki tujuan awal yang harus dipenuhi sesuai target yang telah ditentukan. Indikator tercapainya tujuan juga memiliki makna yang menyatakan bahwa suatu program yang telah direncanakan dan memiliki target, harus dipenuhi kemudian hasil akhir yang diperoleh telah memenuhi target tersebut, dan program dapat dikatakan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang efektivitas program pelatihan bagi penyandang disabilitas di Kota Batu, hasilnya bisa dikatakan efektif berdasarkan tolak ukur kedua indikator dari teori efektivitas menurut Sutrisno, dimana program pelatihan ini telah mencapai ukuran kedua indikator tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu pada Tahun 2018 lalu merupakan pelatihan sablon untuk penyandang disabilitas yang dinaungi oleh yayasan-yayasan yang ada di Kota Batu, sebut saja yayasan Sekolah Luar Biasa Eka Mandiri yang menjadi tempat pelaksanaan program pelatihan sablon ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pelatihan keterampilan memang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas karena memang pelatihan ini yang akan menjadikan modal mereka untuk masuk ke dunia kerja nantinya, seperti halnya pelatihan sablon yang dilaksanakan oleh dinas sosial merupakan modal utama untuk peserta pelatihan agar nantinya mereka bisa membuka usaha sablon sendiri, hal ini memungkinkan karena memang untuk usaha sablon sendiri memang merupakan pekerjaan yang layak dan sesuai untuk penyandang disabilitas, hal ini dibuktikan oleh peserta pelatihan saat melaksanakan program ini, para peserta sebagian besar langsung bisa menyablon baju dan tas saat praktek dilaksanakan, hal ini menunjukkan bahwa memang standar pekerjaan sablon merupakan standar pekerjaan yang pas untuk penyandang disabilitas.

Dinas sosial sendiri dalam menentukan pelatihan apa yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dengan menggunakan metode pendekatan sosial dengan cara menanyakan langsung kepada penyandang disabilitas, pelatihan apa yang mereka inginkan dan kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Metode ini terbilang sangat efektif, karena dibuktikan dengan antusiasnya para penyandang disabilitas untuk mengikuti program pelatihan ini, kemudian dengan standar dan metode pelatihan yang baik maka materi dan praktik yang disampaikan serta diajarkan oleh pemateri dapat tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu salah satu ciri efektivitas program ini adalah dengan melihat pemilihan jenis pelatihan yang tepat dan disesuaikan kebutuhan para penyandang disabilitas. Efektivitas program ini juga dapat dilihat dari penggunaan metode pengajaran yang tepat yaitu dengan menggunakan metode pendekatan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu. Selanjutnya penggunaan alat-alat dan fasilitas pelatihan

seperti alat sablon merupakan nilai tambah tersendiri untuk melengkapi standar efektivitas program pelatihan ini.

Banyak nya dukungan dari berbagai pihak juga menambah nilai positif dari program ini, seperti Pekerja Sosial Masyarakat yang selalu siap untuk membantu setiap program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu, tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan teknis dilapangan. Dukungan dari yayasan-yayasan terkait juga sangat membantu Dinas Sosial untuk mendapatkan data dan informasi terkait penyandang disabilitas di Kota Batu, seperti yayasan Sekolah Luar Biasa EkaMandiri. Berikut ini pembahasan hasil penelitian berdasarkan dua indikator ukuran efektivitas menurut Sutrisno yang di pakai peneliti sebagai tolak ukur untuk melihat tingkat efektivitas pelaksanaan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu.

1. Tercapainya Tujuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu dapat dikatakan efektif karena telah mencapai tujuan atau target yang telah di tentukan sebelumnya. Program pelatihan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu bisa dikatakan telah sesuai dengan indikator tercapainya tujuan, hal ini ditunjukkan dengan beberapa poin yang menyatakan bahwa tujuan program ini telah dicapai. Pertama dapat dikatakan efektif karena program pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan para penyandang disabilitas. Kedua, program pelatihan ini di tunjang dengan fasilitas dan alat-alat yang disediakan oleh Dinas Sosial seperti alat-alat sablon. Ketiga, program pelatihan ini dilengkapi sumber daya yang handal seperti pematerei dan tenaga ahli sablon yang didatangkan langsung oleh Dinas Sosial, hal ini sangat menentukan berjalannya program pelatihan sablon ini dengan baik, karena materi dan praktek yang tersampaikan dengan baik akan menghasilkan produk sablon yang baik pula. Keempat, metode pendekatan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial selama proses sebelum di laksanakan program sampai selesainya pelaksanaan program merupakan nilai tambah yang membuat program pelatihan sablon ini berjalan efektif, karena metode ini berhasil membuat peserta sangat antusias dan semangat untuk mengikuti program pelatihan sablon ini, karena memang pelatihan sablon ini sesuai dengan kemauan dan kemampuan mereka.

Kelima, Dinas Sosial membekali peserta pelatihan dengan alat-alat sablon setelah program tersebut selesai dilaksanakan, Dinas Sosial tahu bahwa pelatihan sablon selama tiga hari tidak akan cukup untuk membuat mereka benar-benar handal, dan solusi terbaik untuk itu adalah membiarkan mereka berkarya sendiri di rumah masing-masing untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki.

Proses pelaksanaan program pelatihan sablon memang tidak berhasil membuat semua peserta langsung bisa melakukan praktek menyablon, hal ini dikarenakan kemampuan setiap peserta berbeda-beda karena para peserta juga memiliki jenis disabilitas yang berbeda-beda. Peserta pelatihan ini dibedakan berdasarkan jenis disabilitas yang dimiliki, seperti tuna daksa (Kelainan tubuh), tuna rungu (Kelainan pendengaran), tuna wicara (kelainan bicara), tuna ganda (disabilitas ganda), dan autis. Meskipun masih ada peserta yang belum terlalu bisa menyablon baju dan tas dengan baik, namun jika di lihat jumlah peserta yang bisa menyablon lebih dominan.

Anggaran yang terbatas dan hanya bisa melaksanakan satu jenis pelatihan tidak menjadikan program pelatihan keterampilan sablon ini gagal, melainkan hal ini mampu dimanfaatkan oleh Dinas Sosial untuk menjadikan program pelatihan ini lebih efektif. Program pelatihan ini hanya melaksanakan satu jenis pelatihan saja yaitu pelatihan sablon hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia hanya cukup untuk satu jenis pelatihan saja, akan tetapi hasil yang dicapai oleh program ini tidak bisa diukur dengan anggaran yang tersedia namun hasil akhir yang menilai, fakta dilapangan mengatakan bahwa peserta pelatihan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pelatihan ini, yaitu mendapatkan keterampilan baru yang bisa mereka jadikan modal untuk masa depan dalam bekerja,

selain itu mereka juga mendapatkan manfaat sosial dari program pelatihan sablon ini seperti mereka lebih bisa dihargai oleh masyarakat dengan karya yang mereka hasilkan.

Tercapainya tujuan suatu program merupakan suatu keberhasilan tersendiri, karenanya motivasi untuk mencapai hal tersebut pasti sangat tinggi. Dinas Sosial Kota Batu sendiri telah mencapai target itu, karena jika berbicara hasil maka program pelatihan ini telah menghasilkan karya-karya dari tangan peserta penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta pelatihan, mereka mengakui bahwa pelatihan ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kemampuan mereka, serta menjadikan modal untuk mereka bisa berkarya lebih baik lagi, terkhusus soal sablon.

2. Perubahan Nyata

Teori Efektivitas menurut Menurut Sutrisno, (2010 :148) berbicara tentang enam indikator untuk mengukur efektivitas suatu program, salah satunya adalah indikator perubahan nyata yang dijadikannya ukuran untuk dapat mengukur apakah suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak. Proses penelitian yang peneliti lakukan untuk melihat program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan menggunakan indikator perubahan nyata, menghasilkan beberapa temuan seperti yang diperoleh oleh peneliti lewat proses wawancara, dokumen dan observasi. Ada beberapa hal dalam pelaksanaan program pelatihan yang secara langsung berdampak pada peserta pelatihan (penyandang disabilitas), dimana ada perubahan-perubahan yang di tunjukan peserta pelatihan setelah mengikuti program pelatihan sablon yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu. Berdasarkan teori ini, jika kita berbicara tentang efektivitas suatu program maka kita juga akan berbicara tentang perubahan nyata apa yang dialami oleh peserta program pelatihan ini, berkaitan dengan itu peneliti melihat ada perubahan nyata yang dialami serta dirasakan oleh peserta program pelatihan sablon yang digagas oleh Dinas Sosial Kota Batu.

Berdasarkan hasil temuan peneliti saat proses penelitian tentang efektivitas capaian kinerja program pelatihan bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Batu, maka indikator perubahan nyata yang peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah, pertama, ada perubahan psikologi atau mental dari para peserta pelatihan (penyandang disabilitas), pasalnya mereka lebih percaya diri karena mereka mampu menghasilkan karya yang baik, kemudian lewat karya yang baik ini mereka akan lebih bisa dihargai dan sekaligus mandaptkan manfaat sosial dan ekonomi jika dipasarkan. Kedua, program pelatihan ini mampu mengubah stigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas, karena pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu berkarya dan menghasilkan apa-apa, semua itu terbantahkan oleh hasil karya sablon yang mampu dihasilkan lewat tangan-tangan penyandang disabilitas, seperti contoh karya sablon baju dan tas yang dihasilkan peserta program sablon yang dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa Eka Mandiri bulan November 2018 lalu.

Berdasarkan teori kebijakan sosial, suatu kebijakan sosial pasti akan memberikan dampak sosial kepada kelompok sasaran dimana kebijakan tersebut di berlakukan dan di implementasikan, dalam penelitian ini kelompok penyandang disabilitas Kota Batu yang menjadi kelompok sasaran kebijakan dari program pelatihan sablon yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu. Tentu ada perubahan nyata yang dialami oleh peserta pelatihan sablon ini, selain kemampuanpara penyandang disabilitas bertambah, mereka juga berubah secara mental dan aspek sosial terutama soal kepercayaan diri mereka meningkat dan dukungan dari masyarakat. Perubahan sosial yang mereka alami seperti, mereka lebih dihargai di masyarakat dan kemudian mereka bisa membangun relasi yang baik dengan masyarakat serta secara mental mereka akan merasa lebih percaya diri, dan itu merupakan titik penting perubahan nyata yang di hasilkan oleh program pelatihan ini.

Hasil temuan peneliti, dimana terdapat fakta menarik dari penyandang disabilitas bahwa mereka cenderung tidak suka bermain atau bersantai, maka dari itu mereka akan lebih telaten jika mereka melakukan suatu pekerjaan yang mereka sukai, seperti melukis, menjahit dan melakukan keterampilan lainnya. Dari fakta ini terlihat bahwa penyandang disabilitas memiliki suatu sumber daya yang bisa diberdayakan karena kecenderungan mereka telaten dalam berkarya, maka tidak heran banyak penyandang disabilitas yang mampu berkarya melebihi orang normal. Kesimpulannya adalah, perubahan nyata yang dihasilkan program pelatihan sablon ini adalah perubahan karakter, mental atau kejiwaan para penyandang disabilitas, dan ini sangat penting untuk perkembangan pola pikir mereka untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Perubahan secara mental dan keterampilan serta perubahan dalam aspek sosial (relasi) merupakan tiga hal penting yang perlu dicatat dari program pelatihan sablon yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Batu bagi para penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Program pelatihan yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu telah memenuhi standar ukuran efektivitas, program pelatihan ini sangat membantu penyandang disabilitas untuk dapat keluar dari masalah sosial dan ekonomi yang melekat pada penyandang disabilitas. Karya yang mereka hasilkan dari program pelatihan sablon yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu mampu mencapai ukuran efektivitas berdasarkan indikator tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Karya yang mereka hasilkan dari program pelatihan ini mampu mengubah pola pikir atau stigma negatif masyarakat tentang penyandang disabilitas dan sekaligus mampu membuka lapangan pekerjaan untuk mereka, tujuan program ini mampu membuat penyandang disabilitas diterima oleh masyarakat luas serta membuka akses pekerjaan bagi mereka. Pencapaian kinerja program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu telah mencapai target yang telah ditentukan (efektivitas). Tingkat pencapaian tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti kesiapan Dinas Sosial dalam melaksanakan program pelatihan ini, ketepatan metode pendekatan sosial yang diterapkan, fasilitas dan sarana pelatihan yang memadai, sumber daya pengajar dan pemateri yang bagus dan bantuan dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) selama proses pelatihan berlangsung serta pembekalan alat-alat sablon untuk peserta pelatihan. Hasil karya yang baik dari penyandang disabilitas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja program pelatihan telah tercapai dan hal ini mampu membuat peserta pelatihan menghasilkan karya yang dapat dihargai dalam aspek sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Ibrahim, Indrawijaya. 2010. *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- International Labour Organization. 2013. *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. (Online) <https://www.ilo.org>. Diakses pada 24/10/2018.
- International Labour Organization. 2013. *Pedoman ILO Tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas Di Tempat Kerja*. (Online) <https://www.ilo.org>. Diakses Pada 22/10/2018.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Situasi Penyandang Disabilitas*.
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. 2017. *Laporan Akhir Memetakan Penyandang Disabilitas (PD) Di Pasar Tenaga Kerja Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

- Setyaningsih, Rima dan Gutama. 2016. *Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel*. Jurnal Sosiologi Dilema. Volume 31 Nomor 1.
- Sholehah, Iffatus. 2017. *Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Volume 1 Nomor 1.
- Simanjorang, Febriana O. 2013. *Efektivita Program Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat Tunga Rungu Wicara Di UPT Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara Dan Lansia Pematang Siantar*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara. Volume 2 Nomor 4.
- Suarmini, Ni Wayan dkk. 2016. *Karakter Anak Dalam Keluarga Sebagai Ketahanan Sosial Budaya Bangsa*. Jurnal Sosial Humaniora. Volume 9 Nomor 1.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2017. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Widodo, Suparno Eko. 2018. *Manajemen Pelatihan*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar.